



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.767, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. Cukai
Hasil Tembakau. Tahun Anggaran 2011.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember

sebesar selisih antara alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.374.984.845.799,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dan kabupaten/kota diatur oleh Gubernur di daerah yang bersangkutan.
- (4) Pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Dalam hal pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan oleh Gubernur, maka pembagian alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 per provinsi dan kabupaten/kota menggunakan alokasi sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011.
- (6) Gubernur yang telah menyampaikan pembagian alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 meliputi Gubernur Provinsi Aceh, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Provinsi Bali, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (7) Rincian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah penerima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV adalah sebesar selisih antara alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011.
- (2) Dalam hal DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan/atau DBH CHT tahun anggaran sebelumnya belum seluruhnya direalisasikan oleh daerah penerima, maka atas sisa DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran sebelumnya tersebut dianggarkan kembali oleh daerah penerima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

RINCIAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Aceh	3.051.479.611
1	Provinsi Aceh	915.443.887
2	Kab. Aceh Barat	50.857.993
3	Kab. Aceh Besar	50.857.993
4	Kab. Aceh Selatan	50.857.993
5	Kab. Aceh Singkil	50.857.993
6	Kab. Aceh Tengah	244.118.370
7	Kab. Aceh Tenggara	50.857.993
8	Kab. Aceh Timur	50.857.993
9	Kab. Aceh Utara	50.857.993
10	Kab. Bireuen	50.857.993
11	Kab. Aceh Pidie	244.118.370
12	Kab. Simeulue	50.857.993
13	Kota Banda Aceh	50.857.993
14	Kota Sabang	50.857.993
15	Kota Langsa	50.857.993
16	Kota Lhokseumawe	50.857.993
17	Kab. Nagan Raya	50.857.993
18	Kab. Aceh Jaya	50.857.993
19	Kab. Aceh Barat Daya	50.857.993
20	Kab. Gayo Lues	244.118.370
21	Kab. Aceh Tamiang	50.857.993
22	Kab. Bener Meriah	244.118.370
23	Kab. Pidie Jaya	244.118.370
24	Kota Subulussalam	50.857.993
II	Total Provinsi Sumatera Utara	10.060.389.551
1	Provinsi Sumatera Utara	3.018.116.865
2	Kab. Asahan	125.416.588
3	Kab. Dairi	334.626.010
4	Kab. Deli Serdang	227.635.273
5	Kab. Karo	711.884.192
6	Kab. Labuhan Batu	110.646.861
7	Kab. Langkat	148.377.522
8	Kab. Mandailing Natal	101.092.317

9	Kab. Nias	93.572.938
10	Kab. Simalungun	1.099.198.302
11	Kab. Tapanuli Selatan	100.502.865
12	Kab. Tapanuli Tengah	104.644.461
13	Kab. Tapanuli Utara	912.827.846
14	Kab. Toba Samosir	90.019.709
15	Kota Binjai	96.339.500
16	Kota Medan	238.924.745
17	Kota Pematang Siantar	638.578.930
18	Kota Sibolga	91.305.393
19	Kota Tanjung Balai	87.706.896
20	Kota Tebing Tinggi	96.704.389
21	Kota Padang Sidempuan	96.267.669
22	Kab. Pakpak Bharat	84.709.415
23	Kab. Nias Selatan	96.791.434
24	Kab. Humbang Hasundutan	327.040.541
25	Kab. Serdang Bedagai	168.152.568
26	Kab. Samosir	92.798.674
27	Kab. Batu Bara	107.856.928
28	Kab. Padang Lawas Utara	97.601.956
29	Kab. Padang Lawas	97.632.526
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	102.582.361
31	Kab. Labuhan Batu Utara	104.929.652
32	Kab. Nias Utara	85.049.091
33	Kab. Nias Barat	85.945.347
34	Kota Gunung Sitoli	84.909.787
III	Total Provinsi Sumatera Barat	5.392.216.455
1	Provinsi Sumatera Barat	1.617.664.928
2	Kab. Limapuluh Kota	1.358.986.141
3	Kab. Agam	224.591.161
4	Kab. Kepulauan Mentawai	85.140.260
5	Kab. Padang Pariaman	85.140.260
6	Kab. Pasaman	211.645.894
7	Kab. Pesisir Selatan	85.140.260
8	Kab. Sijunjung	85.140.260
9	Kab. Solok	243.688.205
10	Kab. Tanah Datar	235.376.935

11	Kota Bukit Tinggi	85.140.260
12	Kota Padang Panjang	85.140.260
13	Kota Padang	85.140.260
14	Kota Payakumbuh	246.365.602
15	Kota Sawahlunto	232.214.469
16	Kota Solok	85.140.260
17	Kota Pariaman	85.140.260
18	Kab. Pasaman Barat	85.140.260
19	Kab. Dharmasraya	85.140.260
20	Kab. Solok Selatan	85.140.260
IV	Total Provinsi Kepulauan Riau	1.649.969.338
1	Provinsi Kepulauan Riau	494.990.801
2	Kab. Bintan	82.498.467
3	Kab. Natuna	82.498.467
4	Kab. Karimun	82.498.467
5	Kota Batam	659.987.735
6	Kota Tanjung Pinang	82.498.467
7	Kab. Lingga	82.498.467
8	Kab. Kepulauan Anambas	82.498.467
V	Total Provinsi Jambi	2.202.342.398
1	Provinsi Jambi	660.702.719
2	Kab. Batanghari	66.070.272
3	Kab. Bungo	66.070.272
4	Kab. Kerinci	880.936.959
5	Kab. Merangin	66.070.272
6	Kab. Muaro Jambi	66.070.272
7	Kab. Sarolangun	66.070.272
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	66.070.272
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	66.070.272
10	Kab. Tebo	66.070.272
11	Kota Jambi	66.070.272
12	Kota Sungai Penuh	66.070.272
VI	Total Provinsi Sumatera Selatan	2.094.258.568
1	Provinsi Sumatera Selatan	628.277.573
2	Kab. Lahat	209.425.857
3	Kab. Musi Banyuasin	41.885.171
4	Kab. Musi Rawas	41.885.171

5	Kab. Muara Enim	41.885.171
6	Kab. Ogan Komering Ilir	41.885.171
7	Kab. Ogan Komering Ulu	41.885.171
8	Kota Palembang	41.885.171
9	Kota Pagar Alam	209.425.857
10	Kota Lubuk Linggau	209.425.857
11	Kota Prabumulih	41.885.171
12	Kab. Banyuasin	41.885.171
13	Kab. Ogan Ilir	41.885.171
14	Kab. OKU Timur	209.425.857
15	Kab. OKU Selatan	209.425.857
16	Kab. Empat Lawang	41.885.171
VII	Total Provinsi Lampung	3.278.017.412
1	Provinsi Lampung	983.405.224
2	Kab. Lampung Barat	80.307.932
3	Kab. Lampung Selatan	142.932.742
4	Kab. Lampung Tengah	428.099.289
5	Kab. Lampung Utara	109.383.737
6	Kab. Lampung Timur	526.509.705
7	Kab. Tanggamus	215.622.254
8	Kab. Tulang Bawang	70.243.230
9	Kab. Way Kanan	79.189.632
10	Kota Bandar Lampung	70.243.230
11	Kota Metro	84.221.983
12	Kab. Pesawaran	154.115.744
13	Kab. Pringsewu	193.256.250
14	Kab. Mesuji	70.243.230
15	Kab. Tulang Bawang Barat	70.243.230
VIII	Total Provinsi DKI Jakarta	1.720.672.475
1	Provinsi DKI Jakarta	1.720.672.475
IX	Total Provinsi Jawa Barat	108.511.444.547
1	Provinsi Jawa Barat	32.553.433.385
2	Kab. Bandung	2.503.891.581
3	Kab. Bekasi	11.921.839.700
4	Kab. Bogor	1.150.039.546
5	Kab. Ciamis	1.815.957.760
6	Kab. Cianjur	1.828.863.421

7	Kab. Cirebon	2.056.529.658
8	Kab. Garut	6.910.962.055
9	Kab. Indramayu	1.260.570.438
10	Kab. Karawang	8.105.265.681
11	Kab. Kuningan	1.663.775.613
12	Kab. Majalengka	5.479.777.446
13	Kab. Purwakarta	1.769.346.571
14	Kab. Subang	2.082.724.823
15	Kab. Sukabumi	1.490.870.143
16	Kab. Sumedang	6.308.169.926
17	Kab. Tasikmalaya	1.702.279.558
18	Kota Bandung	1.587.538.444
19	Kota Bekasi	1.333.396.293
20	Kota Bogor	1.187.613.783
21	Kota Cirebon	4.892.313.171
22	Kota Depok	1.605.914.836
23	Kota Sukabumi	1.555.306.138
24	Kota Cimahi	1.277.269.405
25	Kota Tasikmalaya	1.560.377.590
26	Kota Banjar	1.498.020.155
27	Kab. Bandung Barat	1.409.397.427
X	Total Provinsi Banten	1.962.108.237
1	Provinsi Banten	588.632.000
2	Kab. Lebak	98.105.400
3	Kab. Pandeglang	98.105.400
4	Kab. Serang	558.510.700
5	Kab. Tangerang	98.105.400
6	Kota Cilegon	98.105.400
7	Kota Tangerang	98.105.400
8	Kota Serang	226.333.137
9	Kota Tangerang Selatan	98.105.400
XI	Total Provinsi Jawa Tengah	329.385.940.362
1	Provinsi Jawa Tengah	98.815.782.115
2	Kab. Banjarnegara	3.328.814.154
3	Kab. Banyumas	3.083.382.047
4	Kab. Batang	4.964.803.933
5	Kab. Blora	4.755.312.605

6	Kab. Boyolali	8.277.606.976
7	Kab. Brebes	3.047.818.741
8	Kab. Cilacap	3.065.009.244
9	Kab. Demak	8.219.592.346
10	Kab. Grobogan	4.478.758.657
11	Kab. Jepara	9.811.320.253
12	Kab. Karanganyar	4.473.607.259
13	Kab. Kebumen	3.536.117.610
14	Kab. Kendal	15.748.252.107
15	Kab. Klaten	9.624.337.288
16	Kab. Kudus	57.533.805.290
17	Kab. Magelang	7.358.538.333
18	Kab. Pati	4.273.062.664
19	Kab. Pekalongan	3.071.007.352
20	Kab. Pemasang	3.088.290.215
21	Kab. Purbalingga	3.509.681.864
22	Kab. Purworejo	3.577.557.070
23	Kab. Rembang	3.212.551.546
24	Kab. Semarang	3.733.314.805
25	Kab. Sragen	3.406.456.285
26	Kab. Sukoharjo	3.693.144.071
27	Kab. Tegal	3.337.608.516
28	Kab. Temanggung	13.366.276.084
29	Kab. Wonogiri	3.017.297.034
30	Kab. Wonosobo	5.734.343.926
31	Kota Magelang	2.971.061.696
32	Kota Pekalongan	3.500.687.069
33	Kota Salatiga	3.441.741.881
34	Kota Semarang	5.719.804.502
35	Kota Surakarta	3.532.904.916
36	Kota Tegal	3.076.289.908
XII	Total Provinsi D.I. Yogyakarta	19.815.882.991
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	5.944.764.897
2	Kab. Bantul	3.963.176.598
3	Kab. Gunung Kidul	1.981.588.299
4	Kab. Kulon Progo	2.972.382.449
5	Kab. Sleman	2.774.223.619

6	Kota Yogyakarta	2.179.747.129
XIII	Total Provinsi Jawa Timur	708.331.484.547
1	Provinsi Jawa Timur	212.499.445.369
2	Kab. Bangkalan	6.185.869.230
3	Kab. Banyuwangi	7.232.793.744
4	Kab. Blitar	9.602.646.802
5	Kab. Bojonegoro	20.139.680.387
6	Kab. Bondowoso	12.868.025.198
7	Kab. Gresik	6.220.414.190
8	Kab. Jember	12.510.670.372
9	Kab. Jombang	10.800.288.625
10	Kab. Kediri	25.704.844.014
11	Kab. Lamongan	12.488.172.189
12	Kab. Lumajang	7.484.971.281
13	Kab. Madiun	7.432.178.697
14	Kab. Magetan	6.726.327.778
15	Kab. Malang	31.359.270.478
16	Kab. Mojokerto	7.718.557.623
17	Kab. Nganjuk	11.769.466.966
18	Kab. Ngawi	10.728.706.059
19	Kab. Pacitan	6.416.569.134
20	Kab. Pamekasan	27.278.713.013
21	Kab. Pasuruan	24.823.415.278
22	Kab. Ponorogo	7.188.308.957
23	Kab. Probolinggo	16.176.619.875
24	Kab. Sampang	7.232.734.859
25	Kab. Sidoarjo	13.232.875.311
26	Kab. Situbondo	9.176.209.296
27	Kab. Sumenep	14.892.758.088
28	Kab. Trenggalek	6.592.444.837
29	Kab. Tuban	8.398.409.616
30	Kab. Tulungagung	16.553.928.001
31	Kota Blitar	7.886.461.241
32	Kota Kediri	51.876.301.303
33	Kota Madiun	5.921.863.046
34	Kota Malang	20.954.485.963
35	Kota Mojokerto	6.970.514.303

36	Kota Pasuruan	5.945.960.745
37	Kota Probolinggo	5.754.091.732
38	Kota Surabaya	19.250.292.622
39	Kota Batu	6.336.198.325
XIV	Total Provinsi Kalimantan Tengah	1.892.486.793
1	Provinsi Kalimantan Tengah	567.746.039
2	Kab. Barito Selatan	43.672.772
3	Kab. Barito Utara	43.672.772
4	Kab. Kapuas	43.672.772
5	Kab. Kotawaringin Barat	43.672.772
6	Kab. Kotawaringin Timur	43.672.772
7	Kota Palangkaraya	43.672.772
8	Kab. Barito Timur	43.672.772
9	Kab. Murung Raya	43.672.772
10	Kab. Pulang Pisau	756.994.718
11	Kab. Gunung Mas	43.672.772
12	Kab. Lamandau	43.672.772
13	Kab. Sukamara	43.672.772
14	Kab. Katingan	43.672.772
15	Kab. Seruyan	43.672.772
XV	Total Provinsi Sulawesi Utara	1.569.707.447
1	Provinsi Sulawesi Utara	470.912.235
2	Kab. Bolaang Mongondow	33.636.588
3	Kab. Minahasa	33.636.588
4	Kab. Sangihe	33.636.588
5	Kota Bitung	33.636.588
6	Kota Manado	33.636.588
7	Kab. Kepulauan Talaud	33.636.588
8	Kab. Minahasa Selatan	33.636.588
9	Kota Tomohon	33.636.588
10	Kab. Minahasa Utara	33.636.588
11	Kota Kotamobagu	33.636.588
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.636.588
13	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	33.636.588
14	Kab. Minahasa Tenggara	33.636.588
15	Kab. Bolaang Mongondow Timur	627.882.980
16	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	33.636.588

XVI	Total Provinsi Sulawesi Tengah	2.165.195.123
1	Provinsi Sulawesi Tengah	649.558.538
2	Kab. Banggai	81.194.817
3	Kab. Banggai Kepulauan	81.194.817
4	Kab. Buol	288.692.683
5	Kab. Toli-Toli	288.692.683
6	Kab. Donggala	81.194.817
7	Kab. Morowali	81.194.817
8	Kab. Poso	81.194.817
9	Kota Palu	288.692.683
10	Kab. Parigi Moutong	81.194.817
11	Kab. Tojo Una Una	81.194.817
12	Kab. Sigi	81.194.817
XVII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	8.307.489.583
1	Provinsi Sulawesi Selatan	2.492.246.875
2	Kab. Bantaeng	111.172.375
3	Kab. Barru	118.461.974
4	Kab. Bone	676.178.339
5	Kab. Bulukumba	169.104.153
6	Kab. Enrekang	103.843.619
7	Kab. Gowa	103.843.619
8	Kab. Jeneponto	103.843.619
9	Kab. Luwu	104.215.604
10	Kab. Luwu Utara	103.843.619
11	Kab. Maros	103.843.619
12	Kab. Pangkajene Kepulauan	104.933.470
13	Kab. Pinrang	103.843.619
14	Kab. Selayar	103.843.619
15	Kab. Sidenreng Rappang	103.843.619
16	Kab. Sinjai	547.615.124
17	Kab. Soppeng	2.294.921.917
18	Kab. Takalar	103.843.619
19	Kab. Tana Toraja	114.911.802
20	Kab. Wajo	118.853.538
21	Kota Pare-pare	103.843.619
22	Kota Makassar	103.843.619
23	Kota Palopo	103.843.619

24	Kab. Luwu Timur	103.843.619
25	Kab. Toraja Utara	104.907.365
XVIII	Total Provinsi Bali	8.577.192.732
1	Provinsi Bali	2.573.157.820
2	Kab. Badung	285.906.424
3	Kab. Bangli	306.834.774
4	Kab. Buleleng	3.369.578.755
5	Kab. Gianyar	600.517.853
6	Kab. Jembrana	285.906.424
7	Kab. Karangasem	297.571.410
8	Kab. Klungkung	285.906.424
9	Kab. Tabanan	285.906.424
10	Kota Denpasar	285.906.424
XIX	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	150.608.767.584
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	45.182.630.275
2	Kab. Bima	6.925.497.449
3	Kab. Dompu	3.938.170.588
4	Kab. Lombok Barat	10.670.555.325
5	Kab. Lombok Tengah	21.084.954.823
6	Kab. Lombok Timur	39.158.552.211
7	Kab. Sumbawa	7.151.723.959
8	Kota Mataram	4.859.553.095
9	Kota Bima	3.091.431.648
10	Kab. Sumbawa Barat	3.598.136.954
11	Kab. Lombok Utara	4.947.561.257
XX	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.866.847.912
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	860.054.374
2	Kab. Alor	53.731.660
3	Kab. Belu	216.288.755
4	Kab. Ende	44.261.314
5	Kab. Flores Timur	40.954.970
6	Kab. Kupang	40.954.970
7	Kab. Lembata	423.415.734
8	Kab. Manggarai	40.954.970
9	Kab. Ngada	40.954.970
10	Kab. Sikka	117.662.484
11	Kab. Sumba Barat	167.511.830

12	Kab. Sumba Timur	69.152.835
13	Kab. Timor Tengah Selatan	49.005.492
14	Kab. Timor Tengah Utara	40.954.970
15	Kota Kupang	40.954.970
16	Kab. Rote Ndao	40.954.970
17	Kab. Manggarai Barat	65.021.208
18	Kab. Nagekeo	40.954.970
19	Kab. Sumba Barat Daya	310.896.961
20	Kab. Sumba Tengah	40.954.970
21	Kab. Manggarai Timur	40.954.970
22	Kab. Sabu Raijua	80.295.565
Total		1.373.443.893.666

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO